



RENCANA KERJA

TAHUN 2024

**DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN
LUWU**

**Kantor : Jalan. Sawerigading,
Belopa Utara**

Email : dishub.luwu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 beserta Sumber Dana Indikatif, Indikator dan Evaluasi Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu serta tolak ukur dalam merealisasikan Rencana Kerja yang direncanakan. Selain itu juga dapat membuka informasi tentang Rencana Kerja Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan sekaligus menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Belopa, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU



SUPRIADI, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I/IVb

NIP : 19691231 199703 1 049

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	11
Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.....	30
Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2024.....	44
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	55
Tabel T-C. 33 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam waktu 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu maka dalam pelaksanaan program- kegiatan yang telah menjadi prioritas Daerah tersebut masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang merupakan tindak lanjut dari rencana strategis. Salah satu tujuan Pembangunan Daerah Kab. Luwu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 -2024 adalah : **“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Terpadu”**. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan daerah secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian penting dan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategik bagi pembangunan daerah Kabupaten Luwu. Tujuan diselenggarakannya pembangunan sektor transportasi adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa perhubungan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Keberadaan Rencana Kerja diharapkan menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu memiliki arah dan tujuan organisasi yang jelas. Hal ini mengingat bahwa Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas. Perencanaan yang sistematis tersebut secara langsung akan mampu memandu antar Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu supaya dapat bertindak konsisten terhadap apa yang telah dituangkan dalam dokumen Renstranya.

Disamping itu, penyusunan dokumen ini juga tidak dapat dipisahkan dari apa yang menjadi tujuan akhir dari sistem transportasi nasional dan kewilayahan maupun keterkaitan bidang lainnya yang pada dasarnya untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal, terpadu dan meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7) ;
22. Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3)
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu; (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 146).
25. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024; (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 74).
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 55)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target dan pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa satu tahun mendatang; dan
4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;

- 2 Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perhubungan antar bidang dan tingkat pemerintahan dalam pengelolaan transportasi darat, laut dan udara ;
- 3 Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan transportasi darat, laut dan udara; dan
- 4 Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dengan format tabel T – C.29.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisa pencapaian kinerja Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel T - C.30

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- c. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah terhadap capaian program nasional
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
- e. Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilakukan
- d. Melampirkan Tabel T – C.31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T – C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 s/d 2024. Mengingat Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah Tahun ke Lima pelaksanaan Renstra periode Tahun 2019 s/d 2024, sehingga yang dievaluasi dalam Renja Tahun Anggaran 2024 ini adalah Renstra Periode 2019 s/d 2024. Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi rencana kerja. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Nilai SAKIP OPD	BB	B	B	BB	B	BB	BB	BB
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	82	100	85	85	100	89	89
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100

2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	80
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	80
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	8 Laporan	80
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100	87	100	88	88	100	90	89

2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2.500 OB	984 OB	504 OB	497 OB	98	504 OB	1.488 OB	59
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	80
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	30 Laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	18 laporan	60
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100	79	100	81	81	100	86	86
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 unit	13 unit	20 unit	11 unit	55	20 unit	44 unit	44
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 jenis	8 jenis	10 jenis	7 jenis	70	10 jenis	25 jenis	50
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6 jenis	60
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan Material kantor yang disediakan	80 jenis	10 jenis	16 jenis	12 jenis	75	16 jenis	48 jenis	45

2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	77	70	74	70	94	73	85	85
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	83	100	84	84	100	89	89
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80

2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	79	100	78	100	82	82
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105 unit	21 unit	21 unit	15 unit	21 unit	57 unit	55
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	100	77	100	79	100	83	83
		Persentase kecamatan yang memiliki akses angkutan jalan	77,27	41,23	65,87	43,64	68,18	45,6	59,01
		Persentase pertumbuhan orang dan barang melalui terminal/dermaga/ pelabuhan udara	10	2	5	2	5	2	60
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio konektivitas angkutan jalan	0,79	0,29	0,37	0,29	0,53	0,36	67,9
		V/C Ratio di jalan kabupaten	0,80	0,42	0,52	0,44	0,8	0,48	60
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di	Persentase pemasangan rambu-	23	15	20	17	21	17	81

	Jalan Kabupaten/Kota	rambu lalu lintas															
2.15.02.2.02.03	Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	27 jenis	4 jenis	7 jenis	5 jenis	72	6 jenis	15 jenis	56							
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang tipe C	100	0	80	0	0	80	25	25							
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	1 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	100							
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100	65	80	68	85	100	78	82							
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah jenis Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	8 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	5 jenis	62							
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	110 titik	22 titik	22 titik	22 titik	100	22 titik	66 titik	60							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	1	1	1	1	100	1	1	100
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpanan Lokal	Cakupan penyelenggaraan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpanan local	100	53	100	67	67	100	78	78
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpanan Lokal	Laporan pelaksanaan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpanan Lokal	10	10	10	10	100	10	10	100

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA - P) Tahun 2022, total belanja Dinas Perhubungan Kab. Luwu sebesar Rp. 9.099.115.551,- yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 5.877.510.482,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 3.211.605.069,-

Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2022 sebesar Rp. 8.736.675.401,- atau mencapai 96,02 % dari anggaran Belanja Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 9.099.115.551,-. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari :

1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 5.706.413.957,- atau 99,8 % dari anggarannya sebesar Rp 5.877.510.482,-
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 3.030.261.444,- atau 94,4 % dari anggarannya sebesar Rp. 3.211.605.069,-

Dinas Perhubungan pada Tahun 2022 melaksanakan 3 (Tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan. Adapun 3 Program tersebut yaitu : ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.***

Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan telah dimuat dalam Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Perjanjian Target Kinerja Pimpinan Satuan Kerja yang akan dicapai Tahun 2022.

Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

OPD

: DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN

: Rp. 4.103.086.682,-

REALISASI

: Rp. 4.048.663.107,-

SISA

: Rp. 54.423.575,-

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.612.490,-	28.443.360,-	1.169.130,-	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.212.300,-	7.744.020,-	468.280,-	2 dokumen perencanaan
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.615.000,-	3.555.000,-	60.000,-	1 dokumen RKA
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1.950.000,-	1.925.000,-	25.000,-	1 dokumen perubahan RKA
d.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	5.732.000,-	5.616.540,-	115.460,-	1 dokumen DPA
e.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	4.720.000,-	4.515.000,-	205.000,-	1 dokumen perubahan DPA
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.995.000,-	3.820.000,-	175.000,-	1 laporan capaian kinerja

g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.388.190	1.267.800,-	120.390,-	2 dokumen evaluasi kinerja
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.139.267.412,-	3.106.015.516,-	33.251.896,-	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.124.576.812,-	3.092.084.916	32.491.896,-	50 OB
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	8.825.200,-	8.110.200,-	715.000,-	1 laporan keuangan akhir tahun
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.865.400,-	5.820.400,-	45.000,-	6 laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.862.860,-	302.688.199,-	8.174.661,-	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.852.600,-	20.653.000,-	199.600,-	20 Jenis
b.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.219.400,-	17.838.590,-	380.810,-	10 Jenis
c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000,-	4.300.000,-	380.000,-	2 Jenis
d.	Penyediaan Bahan/Material	41.526.360,-	41.115.550,-	410.810,-	16 Jenis
e.	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.042.500,-	15.008.250,-	34.250,-	3 Jenis
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.542.000,-	203.772.809,-	6.769.191,-	23 OK

4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.250.720,-	449.382.422,-	8.868.298,-	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.500.000,-	31.500.000,-	0,-	1.500 Surat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	70.550.720,-	64.682.422,-	5.868.298,-	12 Bulan
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	356.200.000,-	353.200.000	3.000.000,-	24 OB
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.093.200,-	162.133.610,-	2.959.590,-	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.093.200,-	162.133.610,-	2.959.590,-	17 Unit

OPD

: DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM

: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

ANGGARAN

: Rp.4.942.029.369,-

REALISASI

: Rp. 4.636.412.294,-

SISA

: Rp. 305.617.075,-

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ kota	1.085.790.650,-	1.071.776.700,-	14.013.950,-	
a.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.085.790.650,-	1.071.776.700,-	14.013.950,-	4 Jenis
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.842.971.319,-	1.662.115.400,-	180.855.919,-	
a.	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1.842.971.319,-	1.662.115.400,-	180.855.919,-	1 Unit
3.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	159.483.650,-	150.933.150,-	8.550.500,-	
a.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000,-	14.517.100,-	482.900,-	2 Unit
b.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	87.483.650,-	86.416.050,-	1.067.600,-	1400 Unit
c.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.000.000,-	45.000.000,-	0,-	1.400 Lembar

d.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	2 Unit
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.853.783.750,-	1.751.587.044,-	102.196.706,-	
a.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas	1.360.288.750,-	1.349.846.044,-	10.442.706,-	1 Jenis
b.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	493.495.000,-	401.741.000,-	91.754.000,-	22 Titik

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM : Pengelolaan pelayaran
ANGGARAN : Rp 53.999.500,-
REALISASI : Rp 51.600.000,-
SISA : Rp 2.399.500,-

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpang Lokal	53.999.500,-	51.600.000,-	2.399.500,-	
a.	Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpang Lokal	53.999.500,-	51.600.000,-	2.399.500,-	10 Laporan pelabuhan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp 4.103.086.682,- dan terealisasi sebesar Rp 4.048.663.107,- sisa sebesar Rp 54.423.575,- atau sebesar 98,67 %.

1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 29.612.490,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.443.360,- atau sebesar 96,05 %*

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 8.212.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.774.020,- atau sebesar 94,30%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.615.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.555.000,- atau sebesar 98,34 %
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.925.000,- atau sebesar 98,72 %
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.732.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.616.540,- atau sebesar 97,99 %
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.515.000,- atau sebesar 95,66 %
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.820.000,- atau sebesar 95,62 %
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.388.190,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.267.800,- atau sebesar 91,33 %

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.139.267.412,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.106.015.516,- atau sebesar 98,94 %*

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.124.576.812,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.092.084.916,- atau sebesar 98,96 %
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, alokasi anggaran sebesar Rp. 8.825.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.110.200,- atau sebesar 91,90 %
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.865.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.820.400,- atau sebesar 99,23 %

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 364.672.927,- dan terealisasi sebesar Rp. 361.993.523,- atau sebesar 99,2 %

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 20.852.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.653.000,- atau sebesar 99,04 %
- b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 18.219.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.838.590,- atau sebesar 97,91 %
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.300.000,- atau sebesar 91,88 %
- d. Penyediaan Bahan/Material, alokasi anggaran sebesar Rp. 41.526.360,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.115.550,- atau sebesar 99,01 %
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu, alokasi anggaran sebesar Rp. 15.042.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.008.250,- atau sebesar 99,77 %
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 210.542.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 203.772.809,- atau sebesar 98,78 %

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 458.250.720,- dan terealisasi sebesar Rp. 449.382.422,- atau sebesar 99,06 %

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.500.000,- atau sebesar 100 %
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran sebesar Rp 70.550.720,- dan terealisasi Rp 64.682.422,- atau sebesar 91,68 %
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 356.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 353.200.000,- atau sebesar 99,16 %

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 165.093.200,- dan terealisasi Rp 162.133.610,- atau sebesar 98,21 %

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp 165.093.200,- dan terealisasi Rp. 162.133.610,- atau sebesar 98,21%

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), alokasi anggaran sebesar Rp 4.942.029.369,- dan terealisasi Rp 4.636.412.294,- atau sebesar 93,82 % :

- 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.085.790.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.071.776.700,- atau sebesar 98,71 %**
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.085.790.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.071.776.700,- atau sebesar 98,71 %
- 2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.842.971.319,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.662.115.400,- atau sebesar 90,19%**
 - a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.842.971.319,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.662.115.400,- atau sebesar 90,19 %
- 3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 159.483.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.993.150,- atau sebesar 94,64 %**
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.517.100,- atau sebesar 96,78 %
 - b. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 87.483.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.416.050,- atau sebesar 98,78%
 - c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,- atau sebesar 100 %
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 41,67 %
- 4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.853.783.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.751.587.044,- atau sebesar 94,49 %**
 - a. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.360.288.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.349.846.044,- atau sebesar 99,23 %

- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 493.495.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 401.741.000,- atau sebesar 81,41 %
- C. **Program Pengelolaan Pelayaran, alokasi anggaran sebesar Rp. 53.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.600.000,- atau sebesar 95,56 %**
 - 1. *Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, alokasi anggaran sebesar Rp. 53.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.600.000,- atau sebesar 95,56 %*
 - a. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, alokasi anggaran sebesar Rp. 53.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.600.000,- atau sebesar 95,56 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran capaian pelayanan kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sejauh ini untuk realisasi capaian kinerja hampir keseluruhan dapat terlaksana tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1. Kurang matangnya pada perencanaan awal anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi seperti yang diharapkan. Untuk mengatasi hal – hal dimaksud dilakukan pembinaan dan membuat rencana aksi sekaligus time schedule dan rencana biaya tiap kegiatan.
- 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi retribusi belum mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan belum terbitnya Peraturan Bupati tentang Pemungutan Retribusi di Tepi Jalan Umum dan Pengujian Kendaraan Bermotor
- 3. Kurangnya etos kerja dan semangat kerja dari beberapa aparatur yang menyebabkan tidak selesainya target yang diharapkan

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format tabel T-C.30

Tabel T-C.30
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan
Kabupaten Luwu Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum, Pesawat Udara	Orang		695.000	411.055	595.000	642.000	433.908	444.755	444.765	455.874	
2	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Lembar		1.550	1.620	1.710	1.850	45	0	50	50	
3	Jumlah penduduk	Orang		400.000	420.000	440.000	450.000	364.680	365.608	378.500	395.500	
4	Rasio Ijin Trayek			0,004	0,004	0,004	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	2/3
5	Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit		1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/0	1/1/0	1/1/1	1/1/1	
6	Jumlah angkutan darat	Unit		4.000	4.500	5.000	5.200	2.052	2.924	5.500	6.000	
7	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang		411.055	595.000	642.000	643.000	0	0	225.000	227.000	
8	Persentase layanan angkutan darat	%		0,156	0,11	0,101	0,101	0	0	0,002	0,002	6/7
9	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit		45	48	55	57	0	0	150	165	

10	Jumlah angkutan umum	Unit		4.000	4.500	5.000	5.200	2.052	2.924	5.500	6.000	
11	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		0,009	0,009	0,009	0,009	0	0	0,041	0,045	9/10
12	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit		650	700	800	850	300	25	600	650	
13	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada	Unit		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
14	Pemasangan Rambu-Rambu			28	30	35	36	20	13	26	28	12/13
15	Panjang jalan	Km		3.250	3.350	3.480	3.540	2.948	2.948,24	3.312	3.444	
16	Jumlah kendaraan	Unit		64.000	64.500	65.000	68.000	76.817	81.206	95.000	96.000	
17	Ratio panjang jalan per jumlah kendaraan			0,051	0,052	0,054	0,052	0,038	0,036	0,035	0,035	15/16
18	Jumlah orang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara	Orang		680.000	550.000	600.000	650.000	45.658	15.815	21.500	25.100	
19	Jumlah barang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara	Ton		695	450	500	530	589	186	200	300	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2022

Dari tabel Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Luwu berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Jumlah penumpang angkutan umum

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah penumpang angkutan umum tidak mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan terminal Belopa tidak berfungsi sejak tahun 2017 dan terminal bantu Karetan juga tidak dapat difungsikan sejak Bulan Juni Tahun 2019. Dimana untuk mengukur jumlah penumpang angkutan umum dilakukan di terminal

2. Ratio ijin trayek

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa realisasi ratio ijin trayek tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan aturan dari kementrian Perhubungan yang mengharuskan uji kalibrasi pada alat uji dan untuk mengambil ijin trayek tidak harus dilakukan di wilayah Kabupaten Luwu walaupun kendaraan tersebut terdaftar di wilayah Kabupaten Luwu.

3. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan tidak adanya terminal penumpang di Kab. Luwu. Ke depan, perlu dibangun segera terminal penumpang yang refresentatif.

4. Jumlah angkutan darat

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa jumlah angkutan darat yang ada tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan ekonomi masyarakat Kab. Luwu yang kurang baik ditambah harga-harga kendaraan yang semakin meningkat

5. Kepemilikan KIR angkutan umum

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa kepemilikan KIR angkutan umum tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan aturan untuk pengujian kendaraan bermotor tidak harus di wilayah domisili.

6. Pemasangan rambu-rambu

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa pemasangan rambu-rambu tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan luasnya daerah otonom Kabupaten Luwu dan kurangnya perhatian dari Pemerintah Pusat dalam hal rambu-rambu jalan daerah.

7. Ratio panjang jalan per jumlah kendaraan

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin banyak sehingga perlu alternative kendaraan massal guna menekan laju pertumbuhan kendaraan

8. Jumlah orang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa jumlah orang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan belum berfungsinya dermaga Taddette dan mahal nya harga tiket pesawat serta tidak adanya terminal penumpang untuk mencatat kedatangan dan keberangkatan penumpang bis.

9. Jumlah barang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara

Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa jumlah barang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan belum berfungsinya dermaga taddette dan mahal nya harga tiket pesawat serta tidak adanya terminal penumpang untuk mencatat kedatangan dan keberangkatan penumpang bis.

2.3. Isu – Isu Penting Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Disamping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, rencana tata ruang, rekomendasi KLHS dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis.

Perumusan isu strategis tidak dipisahkan dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, mengingat perannya sebagai dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan

daerah, dilakukan dengan melibatkan stakeholder kabupaten/kota dan provinsi. Selanjutnya, hasil identifikasi terhadap isu strategis tersebut dilakukan scoring untuk menentukan isu strategis mana yang dipilih dengan menggunakan kriteria.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis regional, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, rekomendasi KLHS, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang perhubungan di Kabupaten Luwu. Dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, Dinas Perhubungan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang signifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Dari kriteria tersebut, dengan dihubungkan kepada permasalahan pokok layanan di bidang perhubungan di Kabupaten Luwu yaitu mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah menjadi hal yang harus diwujudkan karena menjadi salah satu tolok ukur pelayanan dan penilaian kinerja pemerintah daerah. Dari telaahan visi dan misi P-RPJMD, capaian kinerja, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS, diperoleh isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- a. Kesadaran masyarakat akan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
- b. Pertumbuhan kendaraan yang tinggi akibat semakin baiknya perekonomian masyarakat dan semakin mudahnya dalam pembiayaan untuk memiliki kendaraan bermotor
- c. Ketersediaan sarana prasarana yang mesti mengikuti perkembangan teknologi.
- d. Pengembangan sarana angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi jumlah kendaraan.
- e. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
- f. Kuantitas, kompetensi, disiplin dan paradigma aparatur masih jauh dari profesional, inovatif dan responsif.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Uraian pada bagian ini bersumber dari hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, dan hasil analisis terhadap KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Berdasarkan sumber tersebut dirumuskan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirumuskan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, yaitu sebagai berikut:

- a. Kabupaten Luwu belum memiliki terminal sebagai pusat pelayanan angkutan penumpang (angkutan pedesaan dan perkotaan).
- b. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya serta pengembangan mobilitas angkutan orang dan barang.
- c. Pertumbuhan panjang jalan yang memenuhi kriteria untuk dilengkapi sarana dan prasarana penunjang dan peningkatan Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) belum diikuti dengan penambahan anggaran yang memadai.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan sesuai kewenangan.
- e. Penyesuaian kebijakan sehubungan dengan pesatnya perkembangan teknologi.
- f. Kondisi geografis Kabupaten Luwu dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah karena secara administratif terdapat 6 kecamatan dipisahkan oleh Kota Palopo.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Luwu
2. Adanya kewenangan untuk memungut berbagai retribusi daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efisien.
4. Posisi Kabupaten Luwu yang dilintasi jalan Trans Sulawesi.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas, dapat dikemukakan jenis pelayanan, aktivitas yang dilakukan, arahan lokasi serta kelompok sasaran pengembangan layanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2024 mendatang.

Rencana Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Tahun 2022 - 2024

No,	Jenis Pelayanan	Aktivitas Pengembangan	Lokasi Pengembangan	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Data dan informasi pembangunan	- Perencanaan - Pelaksanaan - Pengawasan dan Evaluasi	Kabupaten Luwu	Pimpinan Pemerintahan Daerah
2.	Peningkatan kompetensi aparatur	- Bimtek - Pelatihan - Pendampingan/ pembelajaran	Kabupaten Luwu	Aparatur (struktural dan fungsional)
3.	Angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu	- Penyusunan regulasi - Sosialisasi - Penetapan tarif	Seluruh wilayah berdasarkan zona	Masyarakat Kabupaten Luwu
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	- Penyediaan sarana dan prasarana - Peningkatan SDM	Belopa	Masyarakat Kabupaten Luwu
5.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	- Penyempurnaan regulasi - Sosialisasi - Penyediaan sarana dan prasarana	Seluruh wilayah berdasarkan potensi yang ada	Masyarakat Kabupaten Luwu
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	- Penyempurnaan regulasi - Sosialisasi - Penyediaan sarana dan prasarana	Seluruh wilayah berdasarkan potensi yang ada	Masyarakat Kabupaten Luwu
7.	Penyediaan sarana dan prasarana jalan	- Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi	Seluruh wilayah berdasarkan kebutuhan	Masyarakat Kabupaten Luwu
8.	Penerangan Jalan Umum	- Perencanaan/Regulasi - Pelaksanaan - Evaluasi	Seluruh wilayah berdasarkan kebutuhan	Masyarakat Kabupaten Luwu

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kinerja perangkat daerah belum optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah masih kurang maksimal	Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi
		Kompetensi dan profesionalisme aparatur masih rendah
		Sarana dan prasarana yang belum memadai
		Ketersediaan dan pengelolaan data belum maksimal
	Penerimaan PAD dari sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah belum maksimal	Belum optimalnya pengelolaan potensi retribusi sesuai kewenangan yang ada
		Regulasi untuk memungut retribusi di berbagai sektor belum lengkap
		Pemungutan retribusi belum menggunakan basis data yang baik
		Masih lemahnya pembinaan dan pengendalian retribusi daerah
	Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum semakin menurun	Belum tersedianya rute angkutan orang dan barang ke seluruh wilayah kecamatan
		Masih kurangnya fasilitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah
		Sarana dan prasarana angkutan laut belum dimanfaatkan secara maksimal
	Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih tinggi	Kurangnya sarana dan prasarana jalan
		Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk berkendara secara tertib dan teratur
		Kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pendekatan teknokratik. Oleh karena itu, setiap rumusan yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan harus menggunakan dalil-dalil ilmiah. Terkait dengan tabel di atas, secara teknokratik dapat dijelaskan bahwa rumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah. Sedangkan rumusan masalah merupakan beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Adapun akar masalah adalah beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Dalam kerangka perencanaan, masalah pokok akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, berbagai masalah yang dikemukakan akan dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah akan dipecahkan melalui arah kebijakan. Secara sederhana, pemetaan tersebut diatas adalah berdasarkan hasil apa yang diperoleh dan apa yang menyebabkan

perolehan tersebut, atau dengan kata lain apa yang dipicu dan apa yang memicu suatu kinerja.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masalah pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah “kinerja perangkat daerah belum optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah”. Masalah pokok tersebut di atas dapat dianalisis berdasarkan masalah dan akar masalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah masih kurang maksimal.
Kapasitas perangkat daerah dapat diukur berdasarkan struktur organisasi dan sarana prasarana yang tersedia. Sedangkan kapabilitas dapat diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dan anggaran yang tersedia untuk menjalankan roda organisasi. Masalah ini dipicu oleh berbagai akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurangnya kehadiran pegawai secara tepat waktu maupun beraktivitas selama jam kerja, belum adanya ukuran kinerja harian, kurangnya pengetahuan yang mendasar tentang apa yang menjadi tugas dan apa yang merupakan fungsinya sehingga cenderung melaksanakan fungsi yang tidak termasuk tugasnya, masih kurang dilakukannya pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai tugas dan fungsi perangkat daerah di jalan raya. Faktor penyebab dari kondisi ini adalah masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terkait dengan kepegawaian terhadap aparatur.
 - b. Kompetensi dan profesionalisme aparatur masih rendah. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah terbatasnya aparatur yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam perumusan konsep/kebijakan, pengolahan dan analisis data, kurangnya akuntabilitas, responsibilitas, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta belum tumbuhnya kebutuhan akan data dikalangan aparatur.
 - c. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang masih dibawah 65%.
 - d. Ketersediaan dan pengelolaan data belum maksimal. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurang update-nya data kinerja pada masing-masing unit kerja, aparatur belum memahami fungsi berbagai data yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, belum dilakukannya koordinasi dengan pihak eksternal secara baik dan teratur.

2. Penerimaan PAD dari sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah belum maksimal.

Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk memungut retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum serta ijin tertentu. Berdasarkan data yang ada, kewenangan tersebut dirasakan belum maksimal dilaksanakan mengingat bahwa kontribusi dari pendapatan seluruh retribusi tersebut terhadap pendapatan daerah masih rendah. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya pengelolaan potensi retribusi sesuai kewenangan yang ada. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah masih banyaknya tepi jalan umum yang memiliki potensi belum dikelola dan masih banyaknya tempat khusus parkir yang dapat dikelola selain pasar tradisional, belum maksimalnya retribusi dari pengujian kendaraan bermotor, belum dikelolanya retribusi terkait dengan berbagai ijin yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
 - b. Regulasi untuk memungut retribusi di berbagai sektor belum tersedia secara memadai. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum diaturnya secara lengkap pengelolaan retribusi disegala sektor yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
 - c. Pemungutan retribusi belum menggunakan basis data yang baik. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum optimalnya data terkait dengan potensi retribusi (parkir, PKB, ijin, tambat labuh kapal), sehingga inovasi untuk mengembangkan pengelolaan potensi retribusi belum tercipta.
 - d. Masih lemahnya pembinaan dan pengendalian retribusi daerah. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah tarif retribusi yang tidak berubah sejak tahun 2011, masih banyaknya obyek retribusi yang berpotensi belum dikelola, dan masyarakat belum terlibat secara maksimal dalam pengelolaan potensi retribusi.
3. Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum semakin menurun.
Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat bahwa seharusnya pemerintah daerah semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan mobilisasi. Kurangnya pelayanan tersebut akan dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan kendaraan pribadi, yang mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dalam perekonomian masyarakat. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a. Belum tersedianya rute angkutan orang dan barang ke seluruh wilayah kecamatan. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah angkutan kota yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya terdapat 1 (satu) trayek, sedangkan

- angkutan perintis baru melayani 2 (dua) trayek.
- b. Masih kurangnya fasilitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum adanya terminal induk di Kabupaten Luwu.
- c. Sarana dan prasarana angkutan laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum dimanfaatkan pelabuhan yang ada di Kabupaten Luwu untuk pelayaran.

4. Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih tinggi.

Selama periode tahun 2016-2020, berdasarkan data yang tercatat pada Polres Luwu, terjadi sejumlah 1.380 kasus kecelakaan atau rata-rata sejumlah 276 kasus setiap tahun. Dari seluruh kasus kecelakaan tersebut korban meninggal dunia 257 orang atau rata-rata 51 orang pertahun, dengan ratio 0,00014. Artinya bahwa dari setiap 100.000 penduduk Kabupaten Luwu, terdapat 14 orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kurangnya sarana dan prasarana jalan. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah masih rendahnya ketersediaan rambu, marka, traffic light diseluruh wilayah Kabupaten Luwu.
- b. Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk berkendara secara tertib dan teratur. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat untuk menggunakan perlengkapan keselamatan, adanya balapan liar, dan lain-lain.

Kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah bahwa selama ini belum ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi keselamatan di jalan, pengawasan terhadap ketertiban di jalan secara teratur hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian (meskipun ada pihak lain hanya pada waktu-waktu tertentu).

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan yang disajikan pada bagian sebelumnya, diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan, yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

- a. Kesadaran aparaturnya sebagai agen perubahan masih rendah sehingga cenderung pragmatis, kurang disiplin dan lambat dalam transformasi menuju aparaturnya yang profesional, inovatif dan responsif.

- b. Pemahaman aparaturnya terhadap pentingnya perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang konsisten masih rendah sehingga kurang mampu merumuskan kebijakan dan kurang peka dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
- c. Belum adanya *grand design* pengembangan pelayanan di bidang perhubungan.
- d. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi untuk semua aktivitas.
- e. Belum terlaksananya pembangunan terminal Belopa dan Walenrang.
- f. Masih adanya kesulitan dalam pengembangan Pelabuhan Tadette untuk angkutan penyeberangan.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya dokumen Renstra Dinas Perhubungan yang disusun dengan baik dan selaras dengan RPJMD.
- b. Tingkat pendidikan sebagian besar PNS dilingkungan Dinas Perhubungan yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan kompetensinya.
- c. Kewenangan untuk memungut retribusi daerah dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui inovasi dan kreativitas.
- d. Terdapat Bandara Bua dan Pelabuhan Tadette di Kabupaten Luwu yang dapat dikembangkan untuk mendukung mobilitas masyarakat.
- e. Kabupaten Luwu dilintasi jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
- f. Meningkatnya produktivitas di bidang pertanian merupakan peluang untuk pengembangan moda angkutan.

Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi;
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya;
5. Pertumbuhan pembangunann transportasi darat yang merata dan berkelanjutan
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan per-undang-undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu yaitu :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu. Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas pengguna fasilitas transportasi bandara, pelabuhan dan terminal khususnya wanita, lanjut usia, anak-anak dan penyandang disabilitas
2. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi darat

3. Meningkatkan kualitas prasarana fasilitas keselamatan jalan
4. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi laut

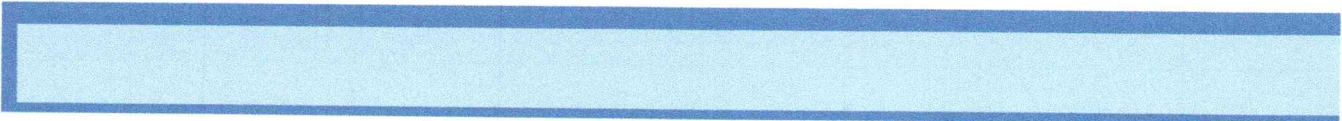
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Peta Jalan (*road map*) Pembangunan Jangka Panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam rangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implemenatsi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional, Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh Karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021, juga dilakukam sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Prioritas pembangunan merupakan dasar dalam menentukan alokasi program/kegiatan dengan kebutuhan indikatif secara umum untuk mendukung pencapaian target kinerja/sasaran tema RKPD Tahun 2021, yang selanjutnya menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.

Rancangan Awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal Perangkat Daerah melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrembang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir



mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

Tabel 3.1
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		CAPAIAN KINERJA DAN TARGET PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2	15	01	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	%	100,00	4.341.759.235	100,00	4.321.484.487	Dinas Perhubungan
2	15	01	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	%		28.067.000	100,00	28.067.000	
2	15	01	01	01	2.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	Dokume n		9.000.000	1	9.000.000	
2	15	01	01	02	2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	Dokume n		3.615.000	1	3.615.000	
2	15	01	01	03	2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1	Dokume n		2.000.000	1	2.000.000	
2	15	01	01	04	2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	Dokume n		5.732.000	1	5.732.000	

2	2	15	01	01	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	4.720.000	1	4.720.000	
2	2	15	01	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	2	Dokumen	3.000.000	2	3.000.000	
2	2	15	01	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%	3.220.089.297	100,00	3.222.648.897	
2	2	15	01	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	504	OB	3.211.948.897	504	3.211.948.897	
2	2	15	01	01	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan	5.000.000	1	5.000.000	
2	2	15	01	01	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	6	Laporan	3.140.400	6	5.700.000	
2	2	15	01	01	01	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan dari retribusi daerah terhadap potensi retribusi yang dikelola perangkat daerah	90,00	%	121.330.300	90,00	84.519.400	
2	2	15	01	01	01	2.0 4	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1	Dokumen	2.000.000	1	2.000.000	
2	2	15	01	01	01	2.0 4	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen kebijakan pengembangan retribusi daerah	1	Dokumen	11.600.000	1	11.600.000	
2	2	15	01	01	01	2.0 4	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan/jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	11	kali/jenis	93.365.150	5	56.554.250	

2	15	01	01	2.0 4	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi daerah yang dilakukan pendataan dan pendaftaran	2	objek retribusi	12.365.150	2	12.365.150	
2	15	01	01	2.0 4	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Dokumen pengelolaan data retribusi daerah	1	Dokume n	2.000.000	1	2.000.000	
2	15	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%	108.700.000	100,00	133.700.000	
2	15	01	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	63	stell/ pasang	25.200.000	63	25.200.000	
2	15	01	01	2.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	Dokume n	2.000.000	1	2.000.000	
2	15	01	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1	orang	4.500.000	1	4.500.000	
2	15	01	01	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4	orang	77.000.000	5	102.000.000	
2	15	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah		%	173.500.000		173.500.000	
2	15	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	unit/buah /set	2.500.000	8	2.500.000	
2	15	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	12.000.000	12	12.000.000	

2	15	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	13.000.000	10	13.000.000	
2	15	01	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	1	bulan	5.000.000	6	5.000.000	
2	15	01	01	2.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	21.000.000	12	21.000.000	
2	15	01	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	66	kali	10.000.000	66	10.000.000	
2	15	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	30	OK	110.000.000	30	110.000.000	
2	15	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%	27.000.000		36.121.290	
2	15	01	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	jenis	27.000.000	4	36.121.290	
2	15	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		%	535.500.000		535.500.000	
2	15	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	60	OB	31.500.000	60	31.500.000	
2	15	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12	bulan	141.000.000	12	141.000.000	
2	15	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	132	OB	363.000.000	132	363.000.000	

2	15	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	%	127.572.638	100,00	107.427.900	
2	15	01	01	2.0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	21	Unit	90.000.000	21	90.000.000	
2	15	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	9	unit/set	10.000.000	9	10.000.000	
2	15	01	01	2.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	19.500	m2	27.572.638	19.500	7.427.900	
2	15	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,63	Angka	5.519.367.642	0,79	5.512.899.865	Dinas Perhubungan
						V/C Ratio di Jalan kabupaten	0,80	Angka		0,80		
2	15	01	02	2.0 1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				5.000.000		305.000.000	
2	15	01	02	2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	1	laporan	5.000.000	1	5.000.000	
2	15	01	02	2.0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	80,00	%	1.099.000.000	80,00	1.054.000.000	
2	15	01	02	2.0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang/disediakan	60	unit	189.000.000	59	129.000.000	

2	15	01	02	2.0 2	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah/Jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	7	unit	910.000.000	7	910.000.000	
2	15	01	02	2.0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C			2.708.312.842		1.706.683.865	
2	15	01	02	2.0 3	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	1	Unit	2.708.312.842			
2	15	01	02	2.0 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				11.100.000		11.100.000	
2	15	01	02	2.0 4	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	10	laporan	11.100.000	10	11.100.000	
2	15	01	02	2.0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum			190.796.800		147.546.800	
2	15	01	02	2.0 5	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1	unit	35.000.000	1	25.000.000	
2	15	01	02	2.0 5	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	orang	50.000.000			
2	15	01	02	2.0 5	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala	1.200	unit	58.800.000	1.200	75.550.000	

2	15	01	02	2.0 5	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1.200	lembar	36.996.800	1.200	36.996.800	
2	15	01	02	2.0 5	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	2	unit	12.000.000	2	12.000.000	
2	15	01	02	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten			1.392.400.000		1.997.800.000	
2	15	01	02	2.0 6	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	5	Jenis	1.062.400.000	4	1.667.800.000	
2	15	01	02	2.0 6	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	22	titik	330.000.000	22	330.000.000	
2	15	01	02	2.0 7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				112.758.000		3.569.200	
2	15	01	02	2.0 7	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12	laporan	112.758.000			
2	15	01	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	1	jaringan lintas	79.840.000	1	380.930.750	Dinas Perhubungan

2	15	01	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				11.100.000		11.100.000	
2	15	01	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	10	laporan	11.100.000	10		11.100.000	
2	15	01	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal			20.000.000			212.000.000	
2	15	01	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	1	dokumen	20.000.000				
2	15	01	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal			48.740.000			157.830.750	
2	15	01	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	10	Pelabuhan	48.740.000	10		95.010.750	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusul pemangku kepentingan, bagi dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan Kepala Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari Penelitian Lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
3. Sajian tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah jenis keselamatan transportasi darat yang terpasang		
	Pemasangan Warning Light	Kecamatan Bajo	Jumlah jenis keselamatan transportasi darat yang terpasang	1 Paket	Telah dimasukkan dalam Rancangan Awal 2024 tetapi karena anggaran yang terbatas maka untuk sementara dipending

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemasangan Traffic Light	Kecamatan Suli	Jumlah jenis keselamatan transportasi darat yang terpasang	1 Paket	Jalan yang diusulkan adalah jalan Negara sehingga menjadi kewenangan pusat. Telah ditindaklanjuti
	Pemasangan Cermin Tikungan	Kecamatan Bajo Barat	Jumlah jenis keselamatan transportasi darat yang terpasang	6 Unit	permohonan pemasangan tersebut ke Balai Besar Jalan dan Jembatan di Makassar
	Meterisasi Kecamatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang	7 Unit	Telah dimasukkan dalam Rancangan Awal Tahun 2023 tetapi karena anggaran yang terbatas maka untuk sementara
	Meterisasi Kecamatan	Kecamatan Bua	Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang	10 Unit	Telah dimasukkan dalam Rancangan Akhir Tahun 2024
	Pemeliharaan Lampu Jalan	Semua Kecamatan	Jumlah pemeliharaan penerangan jalan umum yang disediakan	30 Jenis	Telah dimasukkan dalam Rancangan Akhir Tahun 2024
					Karena anggaran yang terbatas maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa urusan Perhubungan merupakan urusan wajib bukan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Luwu.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2025 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan dibidang Perhubungan dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan tahapan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2019 – 2024 yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang di tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten serta sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten khususnya berkaitan dengan sektor pertanahan, dengan tujuan agar rencana kerja tahun 2020 memberikan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai serta perkiraan dana yang dibutuhkan dari program dan kegiatan tersebut.

Sebagai penjabaran dan Implementasi atas pernyataan Misi I dan III RPJMD Kab. Luwu Tahun 2019 - 2024 perlu dirumuskan tujuan sebagai sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuannya berdasar Misi I adalah *Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional,*

Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel dan Misi III yaitu ***Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan***

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Indikator Tujuan/ Sasaran Tahun 2024

Visi P - RPJMD	Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi		
Misi ke- 1	<i>Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel</i>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
Mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang inklusif untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan di bidang Perhubungan	
		Predikat penilaian implementasi SAKIP PD oleh Inspektorat Kabupaten	B
		Pertumbuhan PAD dari sektor Perhubungan (%)	29,03
Misi ke-3	<i>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkesinambungan</i>		
Mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang	Meningkatkan konektivitas wilayah	Persentase kecamatan yang memiliki akses angkutan umum (%)	68,18

inklusif untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah		Persentase pertumbuhan orang dan barang melalui terminal/dermaga/pelabuhan udara	10,00
--	--	--	-------

Dana yang direncanakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 11.940.966.663,-** dengan rincian :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp 27.451.400,-
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	: Rp 193.565.800,-
Administrasi Keuangan Daerah	: Rp 3.220.079.097,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	: Rp 86.255.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	: Rp 192.708.070,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp 24.000.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp 544.424.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp 159.209.116,-
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	: Rp 4.800.000,-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	: Rp 3.143.599.950,-
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	: Rp 2.705.771.080,-
Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	: Rp 11.062.500,-
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	: Rp 186.600.000,-
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	: Rp 1.334.360.300,-
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	: Rp 103.367.450,-
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	: Rp 18.496.200,-
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKP), Daerah Lingkungan Kepentingan (DLK)	: Rp 19.896.800,-
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengopersian Pelabuhan Pengumpan Lokal	: Rp 49.769.250,-
Jumlah kebutuhan Dana Belanja Langsung sebesar	: Rp 11.940.966.663,-

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu sesuai analisa kebutuhan untuk tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu melaksanakan 3

(Tiga) program, 18 (Delapan Belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Program ini merupakan program perangkat daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi organisasi yang meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, penelitian, dan pengembangan.

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen RKA-

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD

d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen DPA-SKPD

e. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan membiayai penyusunan perubahan dokumen DPA-SKPD

f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dimaksudk untuk membiayai penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD

g. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai beban kerja

b. Koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan akhir tahun SKPD

c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan/ triwulanan/ semesteran SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penyusunan dokumen keuangan semesteran SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian

b. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi aparatur di lingkungan dinas perhubungan untuk mengikuti berbagai macam pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pembelian alat listrik dan elektronik yang membutuhkan penggantian

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

c. Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan peralatan rumah tangga di kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiaya barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai surat kabar/majala, koran, leaflet, brosur
 - f. Penyediaan bahan/materai
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan bahan/materai
 - g. Fasilitas kunjungan tamu
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai kunjungan tamu di dinas perhubungan
 - h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi aparatur perangkat untuk mengikuti koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan peralatan dan pengadaan mesin lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai jasa upa kerja agendarais, arsiparis, aspri, caraka dan belanja perangko/ materai
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai belanja listrik, langganan internet dan pemeliharaan website kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai seluruh penyediaan jasa pelayanan aktivitas perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini merupakan program strategis perangkat daerah yang dimaksud untuk mewujudkan keselamatan pengguna jalan, angkutan umum dan memberikan pelayanan di jalan

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota

a. Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana jalan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan perlengkapan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan di Kabupaten Luwu

2.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

a. Pembangunan gedung terminal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pembangunan gedung terminal penumpang tipe c

2.3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Penyediaan sarana dan prasarana penguji berkala kendaraan bermotor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan kelengkapan operasional alat penguji kendaraan bermotor

b. Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian laik jalan pada kendaraan penumpang dan kendaraan barang

c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor

d. Pemeliharaan sarana dan prasarana penguji berkala kendaraan bermotor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana penguji berkala kendaraan bermotor

2.4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota

a. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan, perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai sarana dan prasarana jalan Kabupaten Luwu seperti, traffic light, warning light, rambu rambu lalu lintas, penerangan jalan dll

- b. Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/ kota

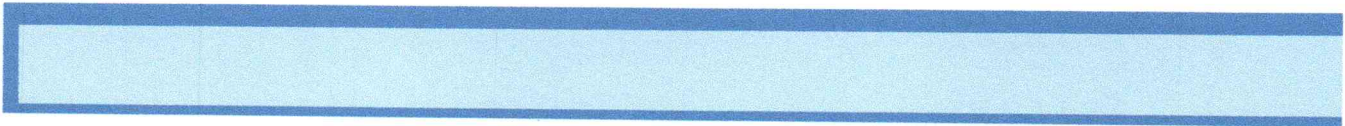
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan tertib kepada pengguna angkutan umum, pengguna jalan, dan penerangan jalan

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini merupakan program untuk memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi laut melalui pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal

- b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- a. Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi rasa aman, tertib, dan memantau aktivitas nelayan di laut dalam mencari ikan dengan menggunakan speed boat



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun 2023 sebanyak 3 (Tiga) Program dengan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2024

2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN TARGET PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
								TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	TARG ET	PAGU			
										9.940.966.877		10.215.315.102		
2	15	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,0 0	%	100,00	4.341.759.235	100,00	4.321.484.487	Dinas Perhubun gan	
2	15	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,0 0	%	100,00	27.876.4000	100,00	28.067.000		
2	15	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	1	Dokum en	8.999.400	1	9.000.000		
2	15	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokum en	3.610.200	1	3.615.000		
2	15	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun	1	Dokum en	2.010.400	1	2.000.000		

2	15	01	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	5.583.300	1	5.732.000	
2	15	01	01	05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	4.680.000	1	4.720.000	
2	15	01	01	07	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	2	Dokumen	2.993.100	2	3.000.000	
2	15	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%	3.220.079.097	100,00	3.222.648.897	
2	15	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	504	OB	3.211.948.897	504	3.211.948.897	
2	15	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan	4.924.800	1	5.000.000	
2	15	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	6	Laporan	3.205.400	6	5.700.000	
2	15	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan dari retribusi daerah terhadap potensi retribusi yang dikelola perangkat daerah	90,00	%	193.565.800	90,00	84.519.400	
2	15	01	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1	Dokumen	1.989.600	1	2.000.000	
2	15	01	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen kebijakan pengembangan retribusi daerah	1	Dokumen	14.599.800	1	11.600.000	
2	15	01	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan/jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	11	kali/jenis	164.884.500	5	56.554.250	

2	15	01	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi daerah yang dilakukan pendataan dan pendaftaran	2	objek retribusi	10.087.500	2	12.365.150
2	15	01	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Dokumen pengelolaan data retribusi daerah	1	Dokumen	2.004.400	1	2.000.000
2	15	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%	86.255.000	100,00	133.700.000
2	15	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	63	stell/pasang	27.060.000	63	25.200.000
2	15	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	Dokumen	1.995.000	1	2.000.000
2	15	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1	orang	5.000.000	1	4.500.000
2	15	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4	orang	52.200.000	5	102.000.000
2	15	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah		%	173.500.000		173.500.000
2	15	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	unit/buah/set	2.473.800	8	2.500.000
2	15	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	11.995.770	12	12.000.000
2	15	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	12.999.700	10	13.000.000

2	15	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	1	bulan	4.680.000	6	5.000.000
2	15	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	30.187.800	12	21.000.000
2	15	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	66	kali	9.932.500	66	10.000.000
2	15	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	30	OK	120.438.500	30	110.000.000
2	15	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%	24.000.000		36.121.290
2	15	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	jenis	24.000.000	4	36.121.290
2	15	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		%	544.424.000		535.500.000
2	15	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	60	OB	31.500.000	60	31.500.000
2	15	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12	bulan	133.484.000	12	141.000.000
2	15	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	132	OB	379.440.000	132	363.000.000
2	15	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	%	159.209.116	100,00	107.427.900

2	15	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	21	Unit	123.099.060	21	90.000.000	
2	15	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	9	unit/set	9.950.000	9	10.000.000	
2	15	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	19,500	m2	26.160.056	19.500	7.427.900	
2	15	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,63	Angka	5.287.098.780	0,79	5.512.899.865	Dinas Perhubungan
							V/C Ratio di Jalan kabupaten	0,80	Angka		0,80		
2	15	01	02	2.01		<i>Pentapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				4.800.000		305.000.000	
2	15	01	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	1	laporan	4.800.000	1	5.000.000	
2	15	01	02	2.02		<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas</i>	80,00	%	1.143.599.950	80,00	1.054.000.000	
2	15	01	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang/disediakan	60	unit	233.600.000	59	129.000.000	
2	15	01	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah/Jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	7	unit	909.999.500	7	910.000.000	
2	15	01	02	2.03		<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C</i>			2.705.771.080		1.706.683.865	

2	15	01	02	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	1	Unit	2.705.771.080		
2	15	01	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				11.062.500	11.100.000	
2	15	01	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	10	laporan	11.062.500	11.100.000	
2	15	01	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum			186.600.000	147.546.800	
2	15	01	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1	unit	32.250.000	25.000.000	
2	15	01	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	orang	0		
2	15	01	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala	1.200	unit	102.000.000	75.550.000	
2	15	01	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1.200	lembar	40.350.000	36.996.800	
2	15	01	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	5	unit	12.000.000	10.000.000	
2	15	01	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten			1.334.360.300	1.997.800.000	

2	15	01	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Jenis Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	5	Jenis	1.001.865.300	4	1.667.800.000	
2	15	01	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	22	titik	332.495.000	22	330.000.000	
2	15	01	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				103.367.450		3.569.200	
2	15	01	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12	laporan	103.367.450			
2	15	01	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	1	jaringan lintas	88.162.250	1	380.930.750	Dinas Perhubungan
2	15	01	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				18.496.200		11.100.000	
2	15	01	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	10	laporan	18.496.200	10	11.100.000	
2	15	01	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)				19.896.800		212.000.000	
2	15	01	03			Pelabuhan Pengumpulan Lokal							

2	15	01	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang ditetapkan	1	dokumen	19.896.800			
2	15	01	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal				49.769.250	157.830.750		
2	15	01	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	10	Pelabuhan	49.769.250	10	95.010.750	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan acuan kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah. Secara umum Renja Perangkat Daerah dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun
2. Langkah- langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Objektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah Kabupaten Luwu yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Strategi Dinas Perhubungan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu maka diperlukan adanya komitmen baik di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu maupun pihak yang terkait. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna pelaksanaan rencana kerja secara optimal.

Belopa, Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Luwu



SUPRIADI, SH., MSI

Pangkat : Pembina Tk. I/IVb

NIP : 19691231 199703 1 049